

NEGERI NGAWI RAMAH
e-jurnal
WEDYADININGRAT
JURNAL KELITBANGAN



Van Den Bosch

**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NGAWI
(BAPPELITBANG)**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 746709, 744627, 743097, Fax. (0351) 745956
Email: bappelitbang@ngawikab.go.id
Website: <http://www.bappelitbang.ngawikab.go.id>

TAHUN 2021

SUSUNAN REDAKSI JURNAL KELITBANGAN

Pengarah :

INDAH KUSUMAWARDANI, S.Pt, M.Si
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi)

Penanggung Jawab :

SARGIAN JANUARDY, SH. MM
(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Ngawi)

Tim Pelaksana :

1. ARSITOWATI, Amd
(Kasubid Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi)
2. ESTHI MINDRATI, SE, MSi
(Kasubid Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi)
3. VITA PURNAMASARI, SE, MM
(Kasubid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi)

Mitra Kerja :

ALIP SATYA, ST

Pembuat Artikel :

1. DWIONO SLAMET RAHARJO, ST
(Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi);
2. TRI WAHYU HANDONO
(Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi);
3. LILIK, SH
(Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang Kabupaten Ngawi).

Alamat Redaksi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 746709, 744627, 743097, Fax. (0351) 745956 Email:bappelitbang@ngawikab.go.id
Website: <http://www.bappelitbang.ngawikab.go.id>

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah Rabbil Alamiin. Segala puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah yang memuat hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Ngawi telah disusun. Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan di segala bidang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dan para stakeholder dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024.

Jurnal Kelitbangan e-Jurnal WEDYADININGRAT Negeri Ngawi Ramah ini adalah volume perdana, volume 3, Nomor 1 dengan memuat beberapa kajian dari berbagai bidang, diantaranya Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi Dan Sosial, Bidang Sumber Daya Alam, Bidang Teknologi Informasi Dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berperan serta dalam publikasi Jurnal Kelitbangan ini. Khususnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi selaku pengarah yang telah berhasil mempercepat terbitnya Jurnal Kelitbangan Negeri Ngawi Ramah ini. Kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan jurnal ini kedepan.

Ngawi, 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1.1	Kajian IPM oleh Bidang Litbang Bappelitbang	1
1.2	Indeks Layanan Infrastruktur di Kab. Ngawi Tahun 2020 oleh Bidang Litbang Bappelitbang	8
1.3	Kajian IPG oleh Bidang Litbang Bappelitbang	15

1. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Ngawi

1.1. Background

Humans are the true wealth of the nation. The main objective of development is to create an enabling environment for its people to enjoy a long, healthy life and lead a productive life. This seems to be a simple fact. But this is often forgotten by various short-term activities to accumulate wealth and money.

Human development places humans as the ultimate goal of development, not just as a tool. The concept of human development is more comprehensive, which includes all the options that humans have at every stage of development, as well as a long-term goal that places development as a means of improving human quality.

Human development means positive growth and changes in the level of welfare. This must occur in all aspects of life, be it economic, social, political, cultural and environmental. Therefore, the main focus of human development is on people and their well-being.

The human development approach combines aspects of commodity production and distribution, as well as enhancement and utilization of human capabilities. Human development looks at all issues in society simultaneously -

economic growth, trade, employment, political freedom or cultural values - from a human point of view. Human development also includes another important issue, namely gender. Thus, human development does not only pay attention to the social sector, but is a comprehensive approach from all sectors. If the development planners in Ngawi Regency have a deep understanding of the concept of human development, it is hoped that they will be able to see all the problems and needs

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya sebagai alat. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia dalam setiap tahapan pembangunan, sekaligus merupakan tujuan jangka panjang yang menempatkan pembangunan sebagai sarana meningkatkan kualitas manusia.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat -

pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural - dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Bila para perencana pembangunan di Kabupaten Ngawi sudah memahami konsep pembangunan manusia secara mendalam, maka diharapkan mereka mampu melihat seluruh permasalahan dan kebutuhan

development comprehensively, so that they can formulate policies appropriately.

Human development measurement was first introduced by UNDP in 1990. UNDP introduced a new idea in human development measurement known as the Human Development Index (HDI). Since then, the HDI has been published regularly in the annual Human Development Report (HDR). The HDI explains how residents can access development outcomes in terms of income, health, education, and so on. This index can describe the quality of life conditions of the population from a qualitative (non-economic) and quantitative (economic) perspective. The method of measurement is also based on the calculation of individual population variables, not accumulative or collective variables, for example, economic growth is measured by changes in total population output regardless of who the producer is. UNDP (United Nation Development Program) provides a measure of the success of human development, namely the Human Development Index. The Human Development Index or HDI for short is a composite index calculated as the average of the Life Expectancy Index, Education Index and Decent Living Standard Index.

Since regional autonomy, each region is expected to know the size of the HDI of its own region both for planning purposes and for evaluation, especially in knowing the development and distribution of human development results.

The population development of Kabupaten Ngawi from period to period has had an impact on development from the human side. The total population of Ngawi Regency in 2019 was 830,108 people including a male population of 405,814 and 424,294 women. With the increasing population, it certainly needs to be followed by an increase in the welfare of the population, in the aspects of education, health and the ability to meet their daily needs. Therefore it is necessary to have a measure to see

pembangunan secara komprehensif, sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan dengan tepat.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari sisi kualitatif (non ekonomi) maupun kuantitatif (ekonomi). Cara pengukurannya pun berdasarkan penghitungan variable individu penduduk, bukan variable akumulatif atau kolektif, misal pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan output total penduduk tanpa melihat siapa penghasilnya. UNDP (United Nation Development Programme) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak.

Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk keperluan perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan bidang manusia.

Perkembangan penduduk Kabupaten Ngawi dari periode ke periode telah membawa dampak terhadap pembangunan dari sisi manusianya. Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2019 sebanyak 830.108 jiwa meliputi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 405.814 jiwa dan perempuan 424.294 jiwa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tentunya perlu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perlu adanya ukuran untuk melihat

the success indicator of this aspect is the Human Development Index (HDI).

In addition, the results of Ngawi's current HDI need to be compared with previous years, and related to the magnitude in macroeconomics such as economic growth. In order to reveal more clearly and in detail about the success of development in Ngawi Regency, it is necessary to have a study. This study will focus on discussing regional development problems as measured by human development.

So that development activities carried out in Ngawi Regency do not experience inequality and do not cause various gaps, then humans as the main subject are not only positioned as the current target, a very strategic step that needs to be done is to pay attention to human resources as early as possible, because they heir to implement the development in the future.

In more detail, there are four reasons why it is necessary to compile a Human Development Index (HDI) in Ngawi Regency.

First, the HDI will provide information about the objective conditions of human quality, so that a complete map of the quality of human resource problems can be obtained.

Second, the results of the preparation of the HDI can be used as a monitoring tool for developments, social changes and changes in the quality of the community in Ngawi Regency.

Third, based on the results of the human development situation analysis, priority problems that are ongoing and may arise in Ngawi District can be identified, so that anticipatory steps can be taken as early as possible. In addition, the competent party can focus attention on specific problems that arise so that the handling is more focused.

Fourth, it is realized that the use of measurement tools for the success or performance of development commonly used, such as the rate of economic growth, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Per-capita Income, are too oriented to indicators of macroeconomic progress as well as

indikator keberhasilan aspek tersebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di samping itu hasil IPM Ngawi yang sekarang ini perlu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan dihubungkan dengan besaran dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka untuk mengungkap lebih jelas dan detail tentang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ngawi, maka perlu adanya kajian. Studi ini akan fokus untuk membahas masalah pembangunan daerah yang diukur dari pembangunan manusia.

Agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi tidak mengalami ketimpangan dan tidak menimbulkan berbagai kesenjangan, maka manusia sebagai subyek utama tidak hanya diposisikan sebagai sasaran saat ini, langkah yang sangat strategis yang perlu dilakukan adalah memberikan perhatian pada sumber daya manusia sedini mungkin, karena mereka adalah pewaris pelaksana pembangunan di masa yang akan datang.

Secara lebih rinci terdapat empat pertimbangan mengapa diperlukan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi.

Pertama, IPM akan memberikan informasi tentang kondisi obyektif kualitas manusia, sehingga dapat diperoleh peta permasalahan kualitas sumber daya manusia yang lengkap.

Kedua, hasil penyusunan IPM dapat digunakan sebagai alat monitoring terhadap perkembangan, perubahan sosial dan perubahan kualitas masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis situasi pembangunan manusia, dapat diidentifikasi prioritas masalah yang tengah berlangsung dan mungkin muncul di Kabupaten Ngawi, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan sedini mungkin. Di samping itu pihak yang berkompeten dapat memusatkan perhatian masalah khas yang muncul sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih terfokus.

Keempat, disadari bahwa penggunaan alat ukur keberhasilan atau kinerja pembangunan yang lazim dipakai seperti Laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per-kapita, yang terlalu berorientasi pada indikator kemajuan ekonomi makro serta

does not represent equality, it has many weaknesses and does not reflect the real conditions of society. On the other hand, measuring instruments such as HDI are considered to be more successful in describing social development that touches the results of human development in all its social aspects. Furthermore, HDI is a composite indicator of very basic human development indicators, namely education, health and people's purchasing power.

1.2. Formulation of the problem

Measuring the success of development in all areas of Ngawi Regency needs to be measured by the HDI number. This figure can show the extent to which the level of achievement of regional development in improving the welfare of its population. To measure this, this study will discuss the following problems:

1. What is the life expectancy of residents in Ngawi Regency 2019?
2. What is the education level of the residents of Ngawi Regency 2019?
3. What is the standard of living worthiness of residents in Ngawi Regency 2019?
4. How big is the achievement of the 2019 Ngawi District Human Development Index (HDI)?
5. What is the projection of the Human Development Index (IPM) for Ngawi Regency 2020-2025?

1.3. Activity Objectives

Based on the formulation of the problem, the objectives to be achieved in this study are:

1. To find out the life expectancy level of the population of Ngawi Regency 2019.
2. To find out the level of education of the population of Ngawi Regency 2019.
3. To find out the standard of living worthiness of residents of Ngawi Regency 2019.
4. To find out how much the level of achievement of the Human Development Index (HDI) in Ngawi Regency 2019.
5. Projecting the Human Development Index (HDI) in Ngawi Regency 2020-2025.

kurang menggambarkan pemerataan, ternyata memiliki banyak kelemahan dan kurang mencerminkan kondisi riil masyarakat. Sebaliknya, alat ukur seperti IPM ternyata dinilai lebih berhasil menggambarkan pembangunan sosial yang menyentuh hasil pembangunan manusia dengan segala aspek sosialnya. Selanjutnya IPM merupakan indikator komposit dari indikator pembangunan manusia yang sangat mendasar yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Pengukuran keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi perlu diukur dengan angka IPM. Angka ini dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur hal tersebut maka penelitian ini akan membahas permasalahan berikut:

1. Seberapa tingkat harapan hidup penduduk Kabupaten Ngawi 2019?
2. Seberapa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Ngawi 2019?
3. Seberapa standar kelayakan hidup penduduk Kabupaten Ngawi 2019?
4. Seberapa besar pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi 2019?
5. Berapa proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi 2020-2025?

1.3. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat harapan hidup penduduk Kabupaten Ngawi 2019.
2. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Ngawi 2019.
3. Untuk mengetahui standar kelayakan hidup penduduk Kabupaten Ngawi 2019.
4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi 2019.
5. Memproyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ngawi 2020-2025.

1.4. Target

This research activity in Ngawi Regency with the objectives as above has the following objectives:

1. The level of welfare and quality of life of the population is measured in terms of: a) health level (life expectancy index), b) education level (education index) and c) population economy (purchasing power level).
2. The measurable achievement of regional development in Ngawi Regency is seen in terms of composite human development.

Keywords :

The Human Development Index (HDI) or commonly known as the Human Development Index (HDI). This index can describe the quality of life conditions of the population from a qualitative (non-economic) and quantitative (economic) perspective.

Conclusion:

Human Development in Ngawi Regency from 2015 - 2019 has continued to progress, which is marked by the increasing number of the Ngawi District Human Development Index. From 2015-2019, the IPM of Ngawi Regency continued to increase by 2.09 points.

In 2016, the HDI of Ngawi Regency (using a new method) was 68.96. This figure increased 0.94 percent from the previous year, namely 68.32 in 2015. In 2018, the IPM of Ngawi Regency was 69.91. This figure increased 0.92 percent from the previous year, namely 69.27 in 2017. In 2019, the IPM of Ngawi Regency was 70.41. This figure increased 0.72 percent from the previous year, namely 69.91 in 2018.

When compared with other districts, the IPM of Ngawi Regency is ranked 23 out of 38 districts / cities in East Java. This ranking has dropped 1 place compared to 2018.

1.4. Sasaran

Kegiatan penelitian di Kabupaten Ngawi ini dengan tujuan seperti diatas memiliki sasaran, sebagai berikut:

1. Terukurnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk dilihat dari aspek: a) tingkat kesehatan (indeks harapan hidup), b) tingkat pendidikan (indeks pendidikan) dan c) ekonomi penduduk (tingkat daya beli).
2. Terukurnya pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Ngawi dilihat dari sisi pembangunan manusia secara komposit.

Kata Kunci :

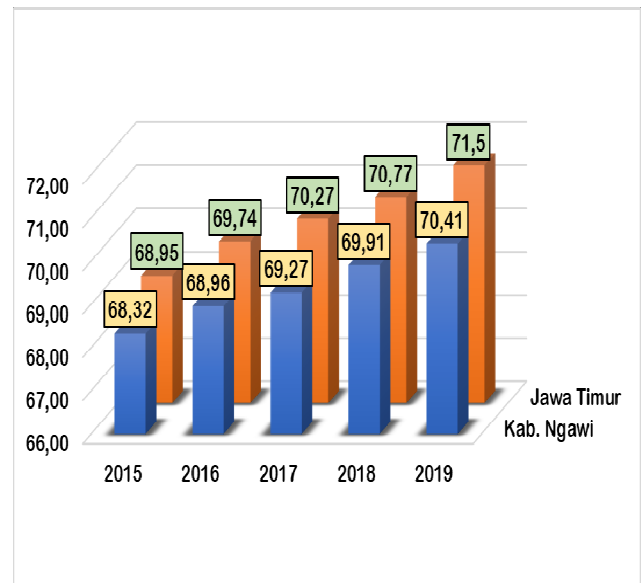
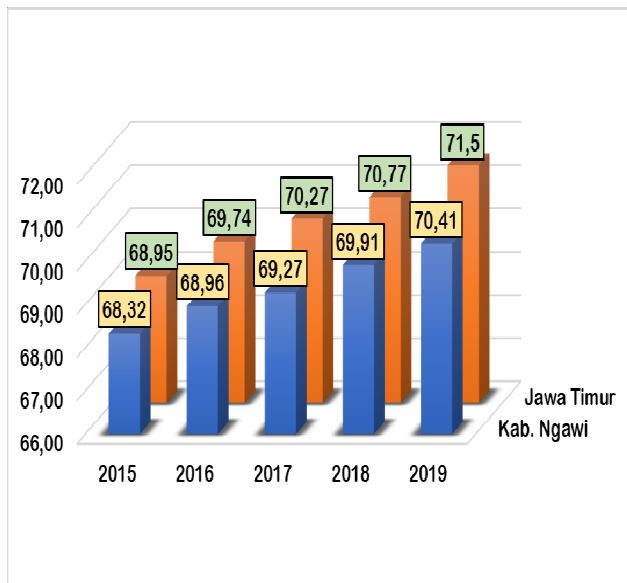
Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa disebut Human Development Index (HDI). Indek ini dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup penduduk dari sisi kualitatif (non ekonomi) maupun kuantitatif (ekonomi).

Kesimpulan:

Pembangunan Manusia di Kabupaten Ngawi dari tahun 2015 - 2019 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi. Dari tahun 2015-2019, IPM Kabupaten Ngawi terus mengalami peningkatan sebanyak 2,09 poin.

Pada tahun 2016, IPM Kabupaten Ngawi (menggunakan metode baru) adalah 68,96. Angka ini meningkat 0,94 persen dari tahun sebelumnya yaitu 68,32 tahun 2015. Pada Tahun 2018, IPM Kabupaten Ngawi adalah sebesar 69,91. Angka ini meningkat 0,92 persen dari tahun sebelumnya yaitu 69,27 tahun 2017. Pada Tahun 2019, IPM Kabupaten Ngawi adalah sebesar 70,41. Angka ini meningkat 0,72 persen dari tahun sebelumnya yaitu 69,91 tahun 2018.

Bila dibandingkan dengan kabupaten lain, IPM Kabupaten Ngawi menduduki ranking ke-23 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Ranking ini turun 1 peringkat dibandingkan dengan tahun 2018.



5.1.1. Life Expectancy (AHH)

The first determining component of the Ngawi District Human Development Index is the Life Expectancy Rate (AHH). Life expectancy (AHH) is the average length of life that the population will achieve.

The results of the calculation show that the life expectancy at birth (eo) of Ngawi Regency in 2019 is 72.16 years. This value increased 0.58 percent from the previous year, namely 71.92 years. The increase in life expectancy at birth indicates an increase in the ability of the population to improve the quality of life and the environment. The improvement in the quality of life will be proportional to the increase in the socio-economic status of the family. Meanwhile, environmental quality is related to the level of public awareness to live in a better physical environment.

How to measure Life expectancy is actually related to infant mortality. The lower the infant mortality rate, the higher the life expectancy and vice versa. Thus, efforts to reduce infant mortality are essential to increase life expectancy.

5.1.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Komponen penentu pertama dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka harapan hidup waktu lahir (eo) Kabupaten Ngawi tahun 2019 sebesar 72,16 tahun. Nilai tersebut meningkat 0,58 persen dari tahun sebelumnya yaitu 71,92 tahun. Penambahan usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup akan sebanding dengan peningkatan status sosio-ekonomi keluarga. Sedangkan kualitas lingkungan berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan fisik yang lebih baik.

Cara pengukuran Angka harapan hidup sebenarnya adalah berhubungan dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi semakin rendah, maka angka harapan hidup semakin tinggi dan sebaliknya. Dengan demikian upaya menurunkan angka kematian bayi adalah suatu yang mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup.

5.1.2. Expectation of Length of School (HLS) and Average Length of School (RLS)

The education index is one of the three main components in the calculation of the human development index (HDI). This index is based on a combination of expected length of schooling and average length of schooling.

In the new method, the next HDI determinant component is the expected length of schooling and the average length of schooling where these two measures will produce the education index.

The expected length of schooling of residents of 7 years and over in Ngawi district in 2019 is 12.69 years. Meanwhile, the average length of schooling for residents of 25 years and over in Ngawi Regency in 2019 is 6.98 years.

5.1.3. Public Purchasing Power (DBM)

This purchasing power indicator is also used by the Ngawi Regency government as a reference in making decisions on its economic development planning.

The level of purchasing power is usually reflected in the strong demand for goods and services driven by increased spending by economic actors, but in general this expenditure tends to be absorbed by consumption factors rather than investment.

The purchasing power of the population in Ngawi Regency continues to increase from year to year in line with developments in the value of income and expenditure per capita of the population and inflation in the rupiah currency. The purchasing power of the people of Ngawi Regency in 2019 is 11,468 million per capita per year.

5.1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama sekolah (RLS)

Indeks pendidikan merupakan salah satu dari tiga komponen pokok dalam perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Dalam metode baru, komponen penentu IPM berikutnya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dimana kedua ukuran ini akan menghasilkan indeks pendidikan.

Harapan lama sekolah dari penduduk 7 tahun keatas di kabupaten Ngawi tahun 2019 sebesar 12,69 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas di Kabupaten Ngawi tahun 2019 adalah 6,98 tahun.

5.1.3. Daya Beli Masyarakat (DBM)

Indikator daya beli ini juga digunakan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan perekonomiannya.

Besarnya angka daya beli biasanya tercermin dari masih kuatnya permintaan barang dan jasa yang didorong oleh peningkatan pengeluaran oleh para pelaku ekonomi tetapi secara umum pengeluaran itu kebanyakan masih cenderung terserap pada faktor-faktor konsumsi bukan pada investasi.

Daya beli masyarakat penduduk di Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan nilai pendapatan dan pengeluaran perkapita penduduk dan inflasi mata uang rupiah. Daya beli masyarakat Kabupaten Ngawi tahun 2019 adalah 11,468 juta per kapita per tahun.

2. Indeks Layanan Infrastruktur di Kab. Ngawi Tahun 2020

1.1. Background

The economic development of a region aims to improve the welfare of the people and the economic growth of the region. The success indicator for economic development can be reflected by economic growth which will determine future development policies. The potential for economic growth of an area is strongly influenced by the quantity and quality of its resources, both physical resources in the form of fertile land, mineral content and other economic value raw materials as well as human resources which include population, level of expertise, culture and outlook on life. them (Todaro 2006).

The availability of infrastructure has an important role as one of the drivers of economic growth in order to accelerate the process of economic development. Infrastructure improvements in general can increase population mobility, accelerate the rate of transport of goods, and increase the quality and quantity of construction facilities. The development and improvement of public facilities and infrastructure which are the responsibility of the provincial government to fulfill the needs and serve the community and to accelerate economic growth must be adjusted to the needs, availability of resources and a sense of justice. Infrastructure that plays a direct role is social and economic infrastructure. Economic infrastructure is the physical infrastructure needed to support economic activity, including public utilities for electricity, water, sanitation and gas) and public work (roads, dams, irrigation and drainage). Social infrastructure includes education, health and housing (World Bank 1994).

Education and health are very important in economic development. health is at the core of well-being, and education is essential for achieving a satisfying and valuable life. Education plays a major role in shaping

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Indikator hssil pembangunan ekonomi dapat dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi yang akan menentukan kebijakan pembangunan di waktu mendatang. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumberdaya fisik berupa tanah yang subur, kandungan mineral dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya maupun sumber daya manusia yang meliputi jumlah penduduk, tingkat keahlian, budaya dan pandangan hidup mereka (Todaro 2006).

Ketersediaan infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi guna mempercepat proses pembangunan ekonomi. Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk memenuhi hajat dan melayani masyarakat dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumberdaya serta rasa keadilan. Infrastruktur yang berperan secara langsung adalah infrastruktur sosial dan ekonomi. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas perekonomian, meliputi public utilities listrik, air, sanitasi dan gas) dan public work (jalan, bendungan, irigasi, dan drainase). Infrastruktur sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan perumahan (World Bank 1994).

Pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. kesehatan merupakan inti kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk

the ability of a developing region to absorb technology and develop capacity to create sustainable growth and development (Todaro 2006).

Development policies that prioritize growth rather than equity. Economic growth is supported by the availability of infrastructure. Differences in infrastructure are one of the causes of regional economic imbalance from one region to another. The existence of inequality in development in Ngawi Regency, it is important to analyze the availability of infrastructure for economic development in Ngawi Regency.

1.2. Formulation of the problem

Ngawi Regency has high economic potential because it has industrial areas, agricultural areas and tourism areas that are very potential. However, the uneven state of infrastructure in the Ngawi area has resulted in inequality. The growth of the infrastructure sector in Ngawi Regency has increased significantly and has contributed significantly to economic growth in several sub-districts.

Infrastructure development has encountered obstacles in Ngawi Regency. In fact, from an investment perspective, investors will choose an area with complete infrastructure. Adequate infrastructure will increase competitiveness. It is necessary to have a model that can provide the correct direction of estimating infrastructure development to achieve an increase in GDP per capita and economic growth. Furthermore, to find out this allegation, the following problems can be formulated:

1. How is the development of GRDP and availability of infrastructure in Ngawi Regency?
2. Does infrastructure (roads, electricity, water, health, and education) have a significant influence on

kemampuan suatu wilayah berkembang untuk menyerap teknologi dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro 2006).

Kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan daripada pemerataan. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Perbedaan infrastruktur merupakan salah satu penyebab adanya ketimpangan perekonomian daerah yang satu dengan daerah yang lain. Adanya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Ngawi ini, maka penting untuk menganalisis ketersediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Ngawi.

1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten Ngawi secara ekonomi berpotensi tinggi karena memiliki kawasan industri, kawasan pertanian dan kawasan wisata yang sangat potensial. Namun, keadaan infrastruktur wilayah Ngawi yang tidak merata mengakibatkan adanya ketimpangan. Pertumbuhan sektor infrastruktur di Kabupaten Ngawi telah mengalami peningkatan yang signifikan dan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah kecamatan.

Pembangunan infrastruktur mengalami kendala di Kabupaten Ngawi. Padahal dari segi investasi, para investor akan memilih daerah yang infrastrukturnya lengkap. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing. Diperlukan adanya suatu model yang dapat memberikan arah dugaan yang tepat terhadap pembangunan infrastruktur untuk mencapai peningkatan PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk mengetahui dugaan tersebut maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan PDRB dan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Ngawi?
2. Apakah infrastruktur (jalan, listrik, air, kesehatan, dan pendidikan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap

GRDP per capita and economic growth in Ngawi Regency.

1.3. Research purposes

The objectives of this research are:

1. To analyze the development of GRDP and the availability of infrastructure in the Ngawi Regency area.
2. To analyze the effect of road infrastructure, electricity, water, health, and education on GDP per capita and economic growth in Ngawi District.

1.4. Benefits of research

The benefits to be given in this research are:

1. This research is expected to be taken into consideration by the government as a decision maker in determining the direction of infrastructure development policies so that the economy of Ngawi Regency will be better.
2. For academics. This research is expected to become information material for future research in the same field.
3. For the general public. This research is expected to be a source of additional knowledge about infrastructure and its development in Ngawi Regency.

1.5. The scope of research

The focus of this research is to analyze the availability of infrastructure and its effect on GRDP per capita and economic growth in Ngawi Regency using the panel data method. This study uses independent variables, namely road infrastructure, electricity, water, health, education. The data used is cross section data in the form of data from the District in Ngawi Regency and time series data for 6 years from 2012 to 2018.

PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perkembangan PDRB dan ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik, air, kesehatan, dan pendidikan terhadap PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur agar perekonomian Kabupaten Ngawi menjadi lebih baik.
2. Bagi para akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian mendatang pada bidang yang sama.
3. Bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber Pengetahuan tambahan mengenai infrastruktur dan perkembangannya di Kabupaten Ngawi.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis ketersediaan infrastruktur serta pengaruhnya terhadap PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi dengan menggunakan metode data panel. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu infrastruktur jalan, listrik, air, kesehatan, didikan. Data yang digunakan adalah data cross section berupa data dari Kecamatan di Kabupaten Ngawi dan data time series selama 6 tahun dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018.

1.6. Research Hypothesis

This research hypothesis is used to determine the relationship between the dependent variable and the independent variable. Based on previous research, several hypotheses can be formulated as follows:

1. Infrastructure development (roads, electricity, water, education and health is thought to have a positive relationship to economic development.
2. The increase in the ratio of community services in Ngawi Regency is better than that of infrastructure development.

Keywords :

The target of increasing infrastructure services covers all sectors of development, which is reflected in the increase in the quality of education, health, transportation, energy (electricity) and communication infrastructure services to the community to realize an economic improvement towards a prosperous society in Ngawi Regency.

Conclusion

The Ngawi District Government has targeted improving infrastructure services as an important part of the Ngawi Regency Government Work Plan for 2021 and the Ngawi Regency Medium Term Development Plan (RPJMD) for 2016-2021.

The target of increasing infrastructure services covers all sectors of development, which is reflected in the increase in the quality of education, health, transportation, energy (electricity) and communication infrastructure services to the community to realize an economic improvement towards a prosperous society in Ngawi Regency.

From the results of the analysis of Infrastructure Services in Ngawi Regency for the period 2017-2019 as shown in Figure 6.1. and table 6.1. below this:

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan dari variabel terikat dengan variabel bebas. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan diduga mempunyai hubungan yang positif terhadap pembangunan ekonomi.
2. Peningkatan ratio pelayanan masyarakat di Kabupaten Ngawi lebih baik dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci :

Target peningkatan Layanan Infrastruktur mencakup seluruh sektor pembangunan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, energy (listrik) dan komunikasi kepada masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Ngawi

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menargetkan peningkatan Layanan Infrastruktur sebagai bagian penting dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021.

Target peningkatan Layanan Infrastruktur mencakup seluruh sektor pembangunan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, energy (listrik) dan komunikasi kepada masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Ngawi.

Dari hasil analisis Layanan Infrastruktur di Kabupaten Ngawi periode tahun 2017-2019 seperti pada gambar 6.1. dan tabel 6.1. dibawah ini:

No	Infra struktur	Tahun			Rata ²
		2017	2018	2019	
1	Pendidikan	94,0%	91,5%	92,2%	1,1%
2	Kesehatan	179,0%	179,0%	176,1%	1,2%
3	Jalan	50,2%	55,0%	55,3%	2,1%
4	Air Minum	74,3%	81,6%	85,5%	4,7%
5	Sanitasi	93,0%	92,9%	93,9%	3,0%
6	Listrik	74,6%	80,0%	78,9%	1,2%
7	Telekomunikasi	7,4%	8,2%	10,7%	0,8%
	Rata-rata	70,5%	72,8%	73,8%	1,8%

From the table of Infrastructure Services in Ngawi Regency for 2017-2019, it can be concluded as follows:

- 1. Coverage of Education Infrastructure Services**
 The coverage of education infrastructure services is the ratio of the number of 12 year old compulsory students registered at the primary, junior high and high school education levels or equivalent to the total population aged 7-18 years. From the results of the analysis of educational infrastructure services in Ngawi Regency in the 2017-2019 period, the ratio of the number of 12 year old compulsory students recorded at the primary, junior high and high school education levels or the equivalent increased from 84.4% to 92.2% or an average increase. - an average of 1.1% per year.
- 2. Health Infrastructure Service Coverage**
 The coverage of health infrastructure services is the ratio of the number of health infrastructure such as hospitals, health centers, pustu, clinics and polindes to the total population in Ngawi district. From the results of the analysis of health infrastructure services in Ngawi Regency in the 2017-2019 period, the ratio of the total health infrastructure increased from 168.0% to 176.1% or an average increase of 1.2% per year. The health infrastructure service referred to here is that when viewed from the number of infrastructure, the number of health infrastructure in Ngawi Regency is sufficient.
- 3. Road Infrastructure Service Coverage**
 Road infrastructure service coverage is the ratio of the total length of roads in a stable condition to the total length of roads. From the results of the analysis of infrastructure services

No	Infra struktur	Tahun			Rata ²
		2017	2018	2019	
1	Pendidikan	94,0%	91,5%	92,2%	1,1%
2	Kesehatan	179,0%	179,0%	176,1%	1,2%
3	Jalan	50,2%	55,0%	55,3%	2,1%
4	Air Minum	74,3%	81,6%	85,5%	4,7%
5	Sanitasi	93,0%	92,9%	93,9%	3,0%
6	Listrik	74,6%	80,0%	78,9%	1,2%
7	Telekomunikasi	7,4%	8,2%	10,7%	0,8%
	Rata-rata	70,5%	72,8%	73,8%	1,8%

Dari tabel Layanan Infrastruktur di Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2019 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Cakupan Layanan Infrastruktur Pendidikan**
 Cakupan layanan infrastruktur pendidikan adalah ratio jumlah murid wajib belajar 12 tahun yang tercatat di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMU atau yang sederajat dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. Dari hasil analisis layanan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 ratio jumlah murid wajib belajar 12 tahun yang tercatat di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMU atau yang sederajat meningkat dari 84,4% menjadi 92,2% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,1% per tahun.
- 2. Cakupan Layanan Infrastruktur Kesehatan**
 Cakupan layanan infrastruktur kesehatan adalah ratio jumlah infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Klinik dan Polindes dengan total jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi. Dari hasil analisis layanan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 ratio jumlah infrastruktur kesehatan meningkat dari 168,0% menjadi 176,1% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,2% per tahun. Layanan infrastruktur kesehatan yang dimaksudkan disini adalah apabila ditinjau dari jumlah infrastruktur maka jumlah infrastruktur kesehatan di Kabupaten Ngawi telah mencukupi.
- 3. Cakupan Layanan Infrastruktur Jalan**
 Cakupan layanan infrastruktur jalan adalah ratio jumlah panjang jalan dengan kondisi mantap dengan jumlah total panjang jalan. Dari hasil analisis layanan infrastruktur

roads in Ngawi Regency in the 2017-2019 period the ratio of roads with steady conditions continued to increase from 40.6% to 55.3% or an increase in the number of roads with steady conditions on average was 2.1% per year.

4. Coverage of Drinking Water Infrastructure Services

The coverage of drinking water infrastructure services is the ratio of the number of houses that have access to safe drinking water to the total number of houses in Ngawi Regency. From the results of the analysis of drinking water infrastructure services in Ngawi Regency in the 2017-2019 period, the ratio of the number of houses that have access to safe drinking water increased from 52.5% to 85.5% or an average increase of 4.7% per year. .

5. Sanitation Infrastructure Service Coverage

The coverage of sanitation infrastructure services is the ratio of the number of houses that have access to a family toilet to the total number of houses in Ngawi Regency. From the results of the analysis of sanitation infrastructure services in Ngawi Regency in the 2017-2019 period, the ratio of the number of houses that had access to family latrines increased from 72.7% to 93.9% or an average increase of 3.0% per year.

6. Electricity Infrastructure Service Coverage

The coverage of electricity infrastructure services is the ratio of the number of families that have access to PLN electricity to the total number of families. From the results of an analysis of electricity infrastructure services in Ngawi Regency in the 2017-2019 period, the ratio of the number of families that had access to PLN electricity increased from 70.7% to 78.9% or an average increase of 1.2% per year.

7. Telecommunication Infrastructure Service Coverage

Telecommunication infrastructure service coverage is the ratio of the number of families that have telephony, internet cafe and speedy access from Telkom to the total number of families. From the results of the analysis

jalan di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 ratio jalan dengan kondisi mantap terus meningkat dari 40,6% menjadi 55,3% atau terjadi peningkatan jumlah panjang jalan dengan kondisi mantap rata-rata sebesar 2,1% per tahun.

4. Cakupan Layanan Infrastruktur Air Minum

Cakupan layanan infrastruktur air minum adalah ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses air minum aman dengan total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Ngawi. Dari hasil analisis layanan infrastruktur air minum di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses air minum aman meningkat dari 52,5% menjadi 85,5% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,7% per tahun.

5. Cakupan Layanan Infrastruktur Sanitasi

Cakupan layanan infrastruktur sanitasi adalah ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses jamban keluarga dengan total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Ngawi. Dari hasil analisis layanan infrastruktur sanitasi di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 ratio jumlah rumah yang telah memiliki akses jamban keluarga meningkat dari 72,7% menjadi 93,9% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,0% per tahun.

6. Cakupan Layanan Infrastruktur Listrik

Cakupan layanan infrastruktur listrik adalah ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses listrik PLN dengan total jumlah keluarga. Dari hasil analisis layanan infrastruktur listrik di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017- 2019 ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses listrik PLN meningkat dari 70,7% menjadi 78,9% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,2% per tahun.

7. Cakupan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi adalah ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses telepon, warnet dan speedy dari Telkom dengan total jumlah keluarga. Dari hasil analisis

Telecommunication infrastructure services in Ngawi Regency in the 2017-2019 period the ratio of the number of families that have access to telephones, internet cafes and speedy from Telkom increased from 4.8% to 10.7% or an average increase of 0.8% per year .

To conclude the overall infrastructure service result can be calculated by means of the average infrastructure service. The average infrastructure service in Ngawi Regency in the 2017-2019 period increased from 60.8% to 73.8% or an average increase of 1.8% per year. From the seven infrastructure service indicators above, we can see that the infrastructure services that have been fulfilled are health infrastructure (> 100%), while infrastructure services that still need to be improved are education infrastructure services, roads, drinking water, sanitation, electricity and telecommunications.

This figure may still be in the area of debate, but this infrastructure service can be a reference that provides an overview of the quality of infrastructure services in general. Of course, a deeper study is still needed to get closer to the real condition that is seen and felt by the public. However, this infrastructure service can already be used as a tool that helps the decision or policy making process.

layanan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 ratio jumlah keluarga yang telah memiliki akses telepon, warnet dan speedy dari Telkom meningkat dari 4,8% menjadi 10,7% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,8% per tahun.

Untuk menyimpulkan hasil layanan infrastruktur keseluruhan dapat dihitung dengan cara layanan infrastruktur rata-rata. Adapun layanan infrastruktur rata-rata di Kabupaten Ngawi pada periode tahun 2017-2019 meningkat dari 60,8% menjadi 73,8% atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,8% per tahun. Dari tujuh indikator layanan infrastruktur diatas, dapat kita lihat layanan infrastruktur yang sudah terpenuhi adalah infrastruktur kesehatan (>100%), sedangkan layanan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan adalah layanan infrastruktur pendidikan, jalan, air minum, sanitasi, listrik dan telekomunikasi.

Angka ini mungkin masih berada dalam ranah perdebatan namun layanan infrastruktur ini dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran kualitas layanan infrastruktur secara umum. Tentunya masih diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk semakin mendekati kondisi senyatanya yang dilihat dan dirasakan oleh publik. Namun layanan infrastruktur ini sudah dapat dijadikan alat yang membantu proses pembuatan keputusan atau kebijakan.

3. Indeks Pembangunan Gender Kab. Ngawi

1.1. Background

Development is an important issue that is never stopped being discussed by poor countries, developing countries or developed countries. Although the context in question or the way in which it is implemented differs from country to country. Development is essentially a continuous effort, which is systematic and planned in part or as a whole of the nation's components to change a situation into a better condition by utilizing all available resources with the aim of improving welfare and improving the quality of life of humans and communities in a country This is also what the Indonesian government has done.

The national development that has been carried out since Indonesia's independence until now, is the manifestation of the mandate of paragraph IV of the Preamble of the 1945 Constitution, namely: to protect the entire nation and all the blood of Indonesia, promote public welfare, educate the nation's life, participate in implementing world order based on independence, peace. lasting and social justice.

National development is not only aimed at increasing economic growth or increasing per capita income but is also expected to improve the quality of all citizens who are an important part of a country. The national development efforts of a country are always aimed at all citizens of a country regardless of gender, race, ethnicity or certain religious groups, although these efforts often occur in the implementation of the impact of injustice, discrimination, and social inequality in society.

Women are a human resource that is large in number and has high potential in relation to being the subject and object of development.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu isu penting yang tak pernah berhenti dibicarakan baik itu oleh negara miskin, negara yang sedang berkembang ataupun negara maju. Meskipun konteks yang dibicarakan ataupun cara yang digunakan untuk melaksanakan berbeda beda pada setiap negara. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu upaya terus menerus ,yang bersifat sistematis dan terencana secara sebagian ataupun keseluruhan komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat disuatu negara, demikian juga yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pembangunan nasional yang dilakukan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ,adalah perwujudan dari amanat dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu :untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja ataupun peningkatan pendapatan perkapita tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas semua warganegara yang menjadi bagian penting dari satu negara. Upaya pembangunan nasional suatu negara selalu ditujukan untuk semua penduduk warga dari suatu negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku ataupun kelompok agama tertentu, meskipun sering terjadi dalam pelaksanaannya upaya ini menimbulkan dampak ketidakadilan, diskriminasi, ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Perempuan adalah sumberdaya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Based on population census data in 2010, the number of Indonesian women reached 118,010,413 people or 49.6 percent of the total population. Based on BPS data in 2019, the number of women in Ngawi Regency reached 457,790 people or 50.11 percent of the total population. Unfortunately, this large number of women is not accompanied by high quality. This can be seen from the backwardness of women against men in the education, employment, income, and other sectors.

Development in any angle needs to see the relationship between the needs and interests of the community as the main factor of development. Development must accommodate the interests and needs of all layers of the population nationally, without neglecting the interests of women. Development in the economic and social fields clearly implies an increase in the role and participation of women at various levels of economic, educational, political and cultural activities. The extent to which women play and their contribution to improving the economic quality of society is also influenced by the relationship between men and women in the division of labor in the household and in the workforce. In the long term, the increase in the status of women in society implies the need for a change in society's view of the household as a supporter of the economy and the functions of family institutions.

Women's empowerment is women's efforts to gain access and control over resources, economy, politics, socio-culture, so that women can organize themselves and increase self-confidence to be able to play a role and participate actively in solving problems, so as to be able to build their abilities and self-concept. In the current era of globalization, competition in the business world is very tight, so we must carefully take advantage of the opportunities that exist to get maximum results. In this competition, it cannot be separated from existing resources. The business world must be supported by a qualified and professional workforce, which is deep

Tercatat berdasarkan data sensus penduduk 2010 jumlah perempuan Indonesia mencapai 118.010.413 jiwa atau 49,6 persen dari total penduduk. Berdasarkan data BPS tahun 2019 jumlah perempuan di Kabupaten Ngawi mencapai 457.790 jiwa atau 50,11 persen dari total penduduk. Sayangnya jumlah yang besar tersebut tidak dibarengi dengan kualitas perempuan yang tinggi pula. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan - ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki baik di sektor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, maupun sektor lainnya.

Pembangunan dalam sudut apapun perlu melihat keterkaitan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai faktor utama pembangunan. Pembangunan harus mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua lapisan penduduk secara nasional, tanpa mengabaikan kepentingan perempuan. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial jelas mengisyaratkan peningkatan peran dan partisipasi wanita dalam berbagai tingkat kegiatan ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Sejauh mana peran wanita serta kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, dipengaruhi juga oleh hubungan antara pria dan wanita di dalam pembagian kerja dalam rumah tangga maupun dalam lapangan kerja. Dalam jangka panjang, peningkatan status wanita dalam masyarakat mengisyaratkan perlunya perubahan pandangan masyarakat tentang rumah tangga sebagai pendukung perekonomian dan fungsi-fungsi lembaga keluarga.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan di dunia usaha sangatlah ketat sehingga kita harus cermat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di dalam persaingan ini tidaklah lepas dari sumber daya yang ada. Dunia usaha harus didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan profesional, yang dalam

this is very dominated by female workers. So that female workers are also required to continue to develop their potential.

However, there is a condition that requires women to play a more role than men, because in addition to playing a role in the household it also plays a role in improving the family economy. Thus, women in Ngawi Regency must prepare themselves to be productive in facing the competition in the existing economic world.

The level of development success that accommodates gender issues can be measured, one of which is the IPG (Gender Development Index) and IDG (Gender Empowerment Index), which were introduced by the United Nations Development Programs (UNDP) in the 1995 Human Development Report. human development which is a composite of four indicators, which emphasizes more on gender status, especially in measuring basic abilities. It is hoped that this IPG figure will be able to provide a partial explanation of development programs that have accommodated gender equality and justice

The Gender Development Index has a function as an evaluation tool to determine the quality of human resources in an area, which in measuring the parameters are separated according to gender. Basically, the Gender Development Index is not much different from the Human Development Index (HDI), the variable used is the same, only the Gender Development Index is more detailed into gender, because the basic function of the Gender Development Index itself is to measure gender inequality in human development.

hal ini sangat didominasi tenaga kerja perempuan. Sehingga tenaga kerja perempuan juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi dirinya.

Tetapi ada suatu kondisi yang menuntut perempuan untuk berperan lebih daripada laki-laki, karena selain berperan dalam rumah tangga juga berperan meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian perempuan di Kabupaten Ngawi harus mempersiapkan dirinya untuk produktif dalam menghadapi persaingan dunia ekonomi yang ada.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), yang telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender

Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameteranya dipisahkan menurut jenis kelamin. Pada dasarnya Indeks Pembangunan Gender tidak jauh berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) variabel yang digunakan pun sama, hanya dalam Indeks Pembangunan Gender lebih dirinci ke dalam jenis kelamin, karena fungsi dasar Indeks Pembangunan Gender itu sendiri adalah untuk mengukur ketimpangan gender pada pembangunan manusia.

1.2. Problem

The fundamental problem in the development of women's empowerment that has occurred so far is the low participation of women in development, in addition to the existence of various forms of discriminatory practices against women. Another fundamental problem is that there are still gaps in women's political participation which stem from the imbalance of the socio-cultural structure of society. In the social context, this gap reflects the limited access of most women to better health services, higher education, and involvement in broader public activities.

1.3. Objectives and benefits

1.3.1 Purpose

The general objective of this study aims to compile a Gender Development Index in Ngawi Regency in 2019 and at the same time project it for 2020-2025. While the specific objectives of this study are

1. Identify the description of the Gender profile in Ngawi District.
2. Calculating the Gender Development Index in Ngawi Regency in 2019
3. Making projections for the Gender Development Index for Ngawi Regency 2020 2025
4. Formulate recommendations to improve the development status and welfare of women in Ngawi District.

1.3.2. Benefits

The results of this study can provide input to the Ngawi Regency government as a reference for planning, implementing and evaluating the women's empowerment program in Ngawi Regency.

1.2. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk menyusun Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Ngawi tahun 2019 dan sekaligus memproyeksikannya tahun 2020 – 2025. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi gambaran profil Gender di Kabupaten Ngawi.
2. Menghitung Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Ngawi tahun 2019
3. Membuat proyeksi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ngawi 2020 2025
4. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan status pembangunan dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Ngawi.

1.3.2. Manfaat

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan Kabupaten Ngawi.

Keywords :

The Gender Development Index has a function as an evaluation tool to determine the quality of human resources in an area, which in measuring the parameters are separated according to gender.

Conclusion:

- a. The IPG of Ngawi Regency in 2019 is 91.83. This figure tends to increase, because the IPG in 2018 was 91.72, 2017 was 91.70, 2016 was 92.16, and 2015 was 92.01.
- b. The IPG projection for Ngawi Regency in 2020 is 91.92, in 2021 it is 92.00, in 2022 it is 92.08, in 2023 it is 92.16, in 2024 it is 92.23 and in 2025 it is 92.29. The IPG of Ngawi Regency until 2025 is projected to continue to increase. The increase varies between 6-8 percent each year. In 2020 to 2023 the increase is 8 percent. In 2024 an increase of 7 percent. In 2025 the increase will be 6 percent.
- c. In 2019 the population of Ngawi Regency becomes 913,533 people or the population growth rate is 0.011% per year. The population structure according to age and sex in Ngawi Regency in 2018 and 2019 can be explained that there are more women than men. Thus the sex ratio is below 100. In 2018 the sex ratio was 99.67 and in 2019 the sex ratio was 99.56.
- d. In 2019 the IPG component in the education sector, namely the average length of school for boys for 7.83, increased compared to 2018, namely 7.45 years and for women there was an increase for 6.56, an increase from the previous, namely for 6.37 years in 2018. The average total length of schooling is 6.98 years.

Kata Kunci :

Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin

Kesimpulan:

- a. IPG Kabupaten Ngawi tahun 2019 adalah angka 91,83. Angka tersebut cenderung meningkat, karena IPG tahun 2018 adalah 91,72, tahun 2017 yaitu sebesar 91,70, tahun 2016 sebesar 92,16, dan tahun 2015 sebesar 92,01.
- b. Proyeksi IPG Kabupaten Ngawi tahun 2020 sebesar 91,92, tahun 2021 sebesar 92,00, tahun 2022 sebesar 92,08, tahun 2023 sebesar 92,16, tahun 2024 sebesar 92,23 dan tahun 2025 sebesar 92,29. IPG Kabupaten Ngawi hingga tahun 2025 diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan bervariasi antara 6-8 persen setiap tahun. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 peningkatan sebesar 8 persen. Pada tahun 2024 peningkatan sebesar 7 persen. Pada tahun 2025 peningkatan terjadi sebesar 6 persen.
- c. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Ngawi menjadi 913.533 jiwa atau laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,011% pertahun. Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Ngawi tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dengan demikian sex rasionya dibawah 100. Pada tahun 2018 sex rasionya 99,67 dan tahun 2019 sex rasionya 99,56.
- d. Pada tahun 2019 komponen IPG di bidang pendidikan yaitu rata rata lama sekolah untuk laki-laki selama 7,83 meningkat daripada tahun 2018 yaitu 7,45 tahun dan perempuan terdapat peningkatan selama 6,56 meningkat dari sebelumnya yaitu selama 6,37 tahun pada tahun 2018. Rata rata lama sekolah total adalah sebesar 6,98 tahun.

- e. Likewise, the expectation for the length of school in 2019 for boys for 12.67 years increased from the previous 12.54 years and the expectation for the length of school for girls for 13.31 years increased from the previous year which was 12.99 years. The total expected length of schooling in 2019 is 12.69 years, an increase from 2018, which is 12.68 years.
- f. The APS of the population aged 7-12 is equivalent to that of elementary school education, so that the figure provides an illustration of the proportion of the population aged 7-12 years who attend primary school, as well as for those aged 13-15 (junior high school level) and so on. The APS for elementary school age has shown a figure of 100 percent, while the APS for junior high school age is 98.98 percent and the APS for high school age is 76.71 percent, where the APS for high school age for boys is 69.40 percent and for girls is 82.77 percent.
- g. The Gross Enrollment Rate (GER) is the ratio between the total population currently studying at a certain level and the entire population according to a certain school age group multiplied by one hundred. The GER of age 7-12 years in Ngawi Regency 2018 is 104.06, with details of the GER for men are 103.72 and GER for women is 104.42. APK for ages 13-15 is 97.98 with details of GER for men are 95.27 and APK for women is 100.96, APK for ages 16-18 is 93.47 with details of GER for men 92.95 and GER for women being 94, 00.
- h. The Net Enrollment Rate (NER) is the ratio between the total population currently attending school and the entire population according to a certain school age group multiplied by one hundred. NER for ages 7-12 years is 95.04, with details for male at 95.59 and for female at 94.44. NER 13-15 years old is 81.62, with details of male 78.91 and female 84.62. NER 16-18 years old is 69.33, with details of male 65.64 and female 73.12.
- e. Demikian juga harapan lama sekolah tahun 2019 untuk laki-laki selama 12,67 tahun meningkat dari sebelumnya yaitu 12,54 tahun dan harapan lama sekolah perempuan selama 13,31 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 12,99 tahun. Harapan lama sekolah total tahun 2019 adalah sebesar 12,69 tahun, meningkat dari tahun 2018 yaitu 12,68 tahun.
- f. APS penduduk usia 7-12 adalah setara dengan jenjang pendidikan SD, sehingga angkanya memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang duduk dibangku SD, demikian pula untuk usia 13-15 tahun (jenjang pendidikan SLTP) dan seterusnya. APS usia SD sudah menunjukkan angka 100 persen, sedangkan APS usia SMP 98,98 persen dan APS SMA sebesar 76,71 persen, dimana APS Usia SMA laki-laki sebesar 69,40 persen dan perempuan sebesar 82,77 persen.
- g. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang tertentu dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu dikalikan seratus. APK usia 7-12 tahun Kabupaten Ngawi 2018 sebesar 104,06, dengan rincian APK laki-laki 103,72 dan APK perempuan 104,42. APK Usia 13-15 tahun sebesar 97,98 dengan rincian APK laki-laki 95,27 dan APK Perempuan 100,96, APK Usia 16-18 tahun sebesar 93,47 dengan rincian APK laki-laki 92,95 dan APK perempuan 94,00.
- h. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu dikalikan seratus. APM Usia 7-12 tahun sebesar 95,04, dengan rincian laki-laki sebesar 95,59 dan perempuan sebesar 94,44. APM Usia 13-15 tahun sebesar 81,62 dengan rincian laki-laki sebesar 78,91 dan perempuan 84,62. APM Usia 16-18 tahun sebesar 69,33 dengan rincian laki-laki sebesar 65,64 dan perempuan 73,12.

- i. The level of education that most people in Kabupaten Ngawi is completing is Elementary School. With a total of 147,707 women, greater than that of 141,299 men. At almost all levels of education, there are more women than men, except at the junior and senior high school levels. At the junior and senior high school levels, the total female population is only 75,568 and 67,721.
- j. The Illiteracy Rate (ABH) describes the proportion of the population who cannot read and write (Latin and other letters). Population 10 years and over who are illiterate is 11.93 percent, with details of male 7.53 percent and female 16.05 percent.
- k. In 2019, the life expectancy for men was 70.59 years, increasing from the previous 69.92 years, while the life expectancy for men was 74.49 years, increasing from 2016, which was 73.81 years. Life expectancy in 2019 is 72.16 years, increasing from 2018, which is 71.92 years.
- l. Based on the health profile of Ngawi Regency in 2018, the number of pregnant women in Ngawi Regency was 11,782, where K1 Visits were 11,339 (96.2%) and K4 Visits were 10,520 (89.3%)
- m. From the health profile of Ngawi District in 2018, the number of maternal deaths was 12 people, where 2 deaths occurred during pregnancy, 2 deaths during childbirth and 8 during the postpartum period. If it is made as an indicator, the maternal mortality rate is 56 per 100,000 live births.
- n. Breast milk is the main and best source of food for babies. Therefore, exclusive breastfeeding is the baby's main need. In Ngawi District in 2018, 76.6% of babies were exclusively breastfed by their mothers, with details of 75.9% male babies and 77.3% female babies.
- i. Tingkat pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Ngawi adalah Tamat SD. Dengan jumlah perempuan sebanyak 147.707 jiwa, lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 141.299 jiwa. Hampir pada semua tingkatan pendidikan, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki, kecuali pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA. Pada tingkatan SMP dan SMA jumlah penduduk wanita hanya 75.568 dan 67.721 jiwa.
- j. Angka Buta Huruf (ABH) menggambarkan proporsi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). Penduduk 10 tahun keatas yang buta huruf sebesar 11,93 persen dengan rincian laki- laki 7,53 persen dan perempuan 16,05 persen.
- k. Pada tahun 2019, angka harapan hidup untuk laki-laki sebesar 70,59 tahun meningkat dari sebelumnya yaitu 69,92 tahun sedangkan angka harapan hidup perempuan adalah 74,49 tahun meningkat dari tahun 2016 yaitu 73,81 tahun. Angka Harapan Hidup tahun 2019 adalah 72,16 tahun meningkat dari tahun 2018 yaitu 71,92 tahun.
- l. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2018, jumlah ibu hamil di Kabupaten Ngawi sebanyak 11.782, dimana Kunjungan K1 sebanyak 11.339 (96,2%) dan Kunjungan K4 sebanyak 10.520 (89,3%)
- m. Dari profil Kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2018, Jumlah Kematian Ibu Maternal 12 orang, dimana kematian terjadi pada masa hamil sebanyak 2 kematian, saat melahirkan 2 kematian dan pada masa nifas 8 kematian. Bila dibuat sebagai indikator angka kematian ibu sebesar 56 per 100.000 kelahiran hidup.
- n. ASI merupakan sumber makanan utama dan terbaik bayi. Oleh karena pemberian ASI eksklusif menjadi kebutuhan bayi yang utama. Di Kabupaten Ngawi pada tahun 2018, sebanyak 76,6 % bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya dengan rincian bayi laki-laki sebesar 75,9 % dan bayi perempuan sebesar 77,3%.

- o. Based on the health profile of Ngawi Regency in 2018, the number of mothers giving birth in Ngawi Regency was 11,246, and those assisted by health workers were 10,380 (92.3%), 10,253 (91.2%) who received postnatal care, and those who received vitamin A as much as 8,686 (77.2%)
- p. In 2017, the IPG component in the economic sector in terms of per capita expenditure was adjusted, namely for men, amounting to 15,196 thousand per capita per year, slightly increasing from the previous year, namely 14,959 thousand per capita per year and adjusted for per capita expenditure for women amounting to 9,362 thousand per capita per year slightly decreased compared to the previous year 9,564 thousand per capita per year.
- q. The Open Unemployment Rate (TPT) in Ngawi Regency in 2019 reached 3.70 percent with men's TPT 3.47 percent and women's TPT 4.01 percent.
- r. Another measure of the labor force that is often used is the labor force participation rate (TPAK), a figure that shows the percentage of the workforce to the working age population. The Labor Force Participation Rate (TPAK) in 2019 was 72.41 percent, with male TPAK 85.94% and female TPAK 59.72%.
- s. Based on their main employment status, as many as 103,983 residents in Ngawi Regency have businesses with the help of temporary / paid laborers. Then 101,889 inhabitants are laborers / employees / employees. Third is self-employed with 81,036 residents.
- o. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2018, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Ngawi sebanyak 11.246, dan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 10.380 (92,3 %), yang mendapatkan pelayanan nifas sebanyak 10.253 (91,2 %), dan yang mendapatkan vitamin A sebanyak 8.686 (77,2%)
- p. Pada tahun 2017 komponen IPG di bidang ekonomi dari segi pengeluaran perkapita disesuaikan yaitu untuk laki-laki sebesar 15.196 ribu per kapita per tahun sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 14.959 ribu per kapita per tahun dan untuk pengeluaran perkapita disesuaikan untuk perempuan sebesar 9.362 ribu perkapita per tahun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 9.564 ribu perkapita pertahun.
- q. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ngawi pada tahun 2019 mencapai 3,70 persen dengan TPT laki-laki 3,47 persen dan TPT Perempuan 4,01 persen.
- r. Ukuran angkatan kerja lainnya yang sering digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu angka yang menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 72,41 persen, dengan TPAK laki-laki 85,94 % dan TPAK Perempuan 59,72 %.
- s. Berdasarkan status pekerjaan utama, sebanyak 103.983 penduduk di Kabupaten Ngawi mempunyai usaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar. Kemudian 101.889 jiwa penduduk merupakan buruh / karyawan/ pegawai. Diurutan ketiga adalah berusaha sendiri dengan 81.036 penduduk.

